



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 137 TAHUN 1991
T E N T A N G
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Angkat : bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan pembukaan dan penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembina Madrasah swasta disekitarnya.
- Angkat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1991;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama No 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984.

Perhatikan: Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-387/I/91 tanggal 6 Mei 1991.

M E M U T U S K A N

- Angkat : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.
- Angkat : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;

- : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 378 buah menjadi 442 buah, jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 430 buah menjadi 452 buah dan jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 167 buah menjadi 201 buah;
- : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
 Pada tanggal : 11 Juli 1991



MENTERI AGAMA RI

ONAWIR SJADZALI

- Daftar :
- 1. KESRA di Jakarta;
 - 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
 - 3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 - 4. Menteri Keuangan di Jakarta;
 - 5. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
 - 6. Komisi IX DPR-RI di Jakarta;
 - 7. Menteri Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
 - 8. Menteri/Para Dirjen/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri
 - 9. Gubernur KDH Tk I di seluruh Indonesia;
 - 10. Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kapuskalibang Agama/Sekretaris/Asdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama di Jakarta;
 - 11. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/ setingkat diseluruh Indonesia;
 - 12. Kepala Kantor Dep. Agama/Kodya di seluruh Indonesia;
 - 13. Menteri Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta;
 - 14. Menteri Hukum dan Keadilan Departemen Agama

No.	Provinsi	Kecamatan	Nama Sekolah	Jenis Sekolah	Tahun Didirikan
13.	SUMATERA BARAT	KAB. AGAM	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Simpang Empat	Kab. Agam	1961
14.			Madrasah Ibtidaiyah Negeri Padang Tulang	Kab. Langkat	1961
15.			Madrasah Ibtidaiyah Negeri D. Lok Masirah	Kab. Deli Serdang	1961
16.			Madrasah Ibtidaiyah Negeri D. Lok Masirah	Kab. Bukit Tinggi	1961
17.			Madrasah Ibtidaiyah Negeri D. Lok Masirah	Kab. Pekanbaru	1961
18.	RIAU	KAB. BATANG KAYU	Madrasah Ibtidaiyah Negeri D. Lok Masirah	Kab. Batang	1961
19.			Madrasah Ibtidaiyah Negeri D. Lok Masirah	Kab. Selatpanjang	1961
20.			Madrasah Ibtidaiyah Negeri D. Lok Masirah	Kab. Bengkalis	1961
21.	KALIMANTAN BARAT	KAB. KOTA WARTIDIN	Madrasah Ibtidaiyah Negeri D. Lok Masirah	Kab. Kota Waringin	1961
22.			Madrasah Ibtidaiyah Negeri D. Lok Masirah	Kab. Kota Waringin	1961
23.			Madrasah Ibtidaiyah Negeri D. Lok Masirah	Kab. Kota Waringin	1961
24.	JAWA BARAT	KAB. KARANGANYAR	Madrasah Ibtidaiyah Negeri D. Lok Masirah	Kab. Karanganyar	1961
25.			Madrasah Ibtidaiyah Negeri D. Lok Masirah	Kab. Karanganyar	1961
26.			Madrasah Ibtidaiyah Negeri D. Lok Masirah	Kab. Karanganyar	1961
27.	JAWA TENGAH	KAB. KARANGANYAR	Madrasah Ibtidaiyah Negeri D. Lok Masirah	Kab. Karanganyar	1961
28.			Madrasah Ibtidaiyah Negeri D. Lok Masirah	Kab. Karanganyar	1961
29.			Madrasah Ibtidaiyah Negeri D. Lok Masirah	Kab. Karanganyar	1961